

REORIENTASI PEMBANGUNAN PEDESAAN SEBAGAI BASIS PERBAIKAN DISTRIBUSI PENGUASAAN LAHAN BAGI PETANI¹⁾

Reorientation of Rural Development as a Base for Improving Land Ownership Distribution at Farmer Level

Erizal Jamal

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jalan A. Yani No. 70, Bogor 16161
Telp. (0251) 8333964, Faks. (0251) 8314496
e-mail: pse@litbang.deptan.go.id*

Diajukan 3 November 2012; Disetujui 25 Januari 2013

ABSTRAK

Tingginya ketimpangan penguasaan lahan di tingkat petani telah menghambat berbagai upaya perbaikan kehidupan masyarakat pedesaan. Beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh petani berlahan sempit karena berbagai sebab, dan kondisi ini dalam banyak kasus malahan makin memperlebar ketimpangan, karena hanya petani berlahan luas yang dapat memanfaatkan berbagai peluang yang diciptakan melalui program dimaksud. Ke depan diperlukan reorientasi pembangunan pedesaan dengan lebih menekankan pada upaya peningkatan akses petani terhadap informasi, permodalan, teknologi, dan kapasitas mereka untuk dapat memanfaatkan peluang yang tersedia di sekitarnya. Reorientasi pembangunan pedesaan ke depan diawali perubahan pendekatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan penekanan pada upaya pengembangan jenis usaha yang beragam, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang berkembang di sekitarnya. Upaya ini perlu didukung dengan pelaksanaan pembangunan pedesaan dengan pendekatan wilayah secara terpadu, melalui kerja sama yang kuat di tingkat kecamatan di bawah koordinasi Bappeda kabupaten. Musyawarah perencanaan pembangunan pedesaan perlu diarahkan pada dua hal pokok. Pertama, membuka peluang usaha baru, terutama yang tidak berbasis lahan luas. Kedua, meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menangkap peluang usaha yang ada. Teknologi yang dikembangkan harus bersifat netral terhadap skala usaha dan diseminasi teknologi diupayakan proporsional untuk dapat menjangkau semua lapisan petani.

Kata kunci: Pembangunan pedesaan, penguasaan lahan, distribusi lahan, petani

ABSTRACT

The problem of unbalanced land distribution at farm level in Indonesia has hampered many efforts to improve rural livelihoods.

Several development programs that have been implemented by the government have not been fully benefitted by smallholders due to various reasons, and in many cases this condition even further widen inequality, because only landowners who are able to take advantage the vast range of opportunities created through the programs. In the future, a reorientation of rural development is needed with more emphasis on improving farmers' access to information, capital, technology, and their capacity to take advantage of opportunities that are locally available. Reorientation of rural development will be initiated with changes of the approaches in the planning and implementation of development, with emphasis on the development of diverse types of businesses, as well as capacity building of the community to take advantage of the growing local opportunities. These efforts need to be supported by the implementation of rural development with an integrated approach, through a strong cooperation at the district level under the coordination of District Development Planning Agency. Rural development planning should be directed to two main issues. Firstly, open up new business opportunities, especially those non-based land activities. Secondly, build the community capacity to capture the existing business opportunities. The technologies being developed should be neutral with respect to farmers land ownership, and the technology dissemination is supposed to be proportional in order to reach all levels of farmers.

Keywords: Rural development, land ownership, land distribution, farmers

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan sejak Orde Baru sampai Kabinet Indonesia Bersatu II telah berhasil membawa Indonesia mencapai keberhasilan dalam pembangunan fisik. Namun, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya dapat memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber daya lahan, sehingga ketimpangan pengu-

¹⁾ Naskah disarikan dari bahan Orasi Profesor Riset yang disampaikan pada tanggal 20 Desember 2011 di Bogor.

asaan lahan dan kemiskinan di pedesaan semakin meluas (Lakollo *et al.* 2007; Tjondronegoro dan Wiradi 2008; Yusuf 2010). Upaya perbaikan akses petani terhadap lahan melalui program *land reform* dan transmigrasi belum banyak memperbaiki keadaan. Perbaikan akses terhadap lahan tanpa diikuti perbaikan akses terhadap aspek lainnya menyebabkan petani penerima objek *land reform* dan lahan transmigrasi tetap terjebak pada kegiatan usaha tani berbasis lahan (Yunilisiah 1996).

Kurang berkembangnya ragam usaha di pedesaan dan tingginya ketergantungan pada lahan, sementara penambahan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan area pertanian, menyebabkan penguasaan lahan oleh petani semakin sempit (Jamal *et al.* 2002; Jamal 2009a; Soetarto 2010). Hal ini terutama didorong oleh proses fragmentasi melalui pewarisan. Bila tidak ada perbaikan, diperkirakan jumlah rumah tangga dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 ha pada Sensus Pertanian 2013 akan meningkat melebihi 15 juta rumah tangga (Jamal *et al.* 2001, 2002; Lokollo *et al.* 2007).

Ke depan diperlukan reorientasi pembangunan pedesaan dengan lebih menekankan pada upaya peningkatan akses petani terhadap informasi, permodalan, teknologi, dan kapasitas mereka untuk dapat memanfaatkan peluang pembangunan yang tersedia. Melalui upaya ini akan terbuka peluang diversifikasi usaha dan kesempatan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada usaha berbasis lahan di pedesaan. Kondisi ini menjadi landasan bagi terselenggaranya perbaikan distribusi penguasaan lahan di pedesaan, melalui perbaikan akses petani terhadap fasilitas dan sumber daya lainnya di pedesaan. Hal ini semakin relevan bila dikaitkan dengan pencanangan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang salah satu strateginya adalah pengembangan sumber daya manusia dan iptek untuk meningkatkan daya saing.

Tulisan ini disusun untuk mendukung upaya reorientasi pembangunan pedesaan, dengan penekanan pada pengembangan kapasitas masyarakat dan perluasan ragam usaha yang tidak berbasis lahan di pedesaan.

ORIENTASI PEMBANGUNAN PEDESAAN

Pembangunan pedesaan diartikan sebagai upaya meningkatkan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa, yang ditandai oleh perbaikan akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya dan fasilitas yang ada, sehingga mereka memperoleh

kepuasan dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual (Jayadinata dan Paramandika 2006; Jamal 2008b, 2009a).

Pendekatan Pembangunan Pedesaan

Strategi pembangunan pedesaan di negara berkembang menganut tiga model pendekatan. Pertama, model intervensi rendah atau disebut juga model produktivitas. Kedua, model intervensi menengah atau solidaritas. Ketiga, model intervensi tinggi atau disebut juga model *equality* atau pemerataan. Ketiganya membedakan peran pemerintah dan pendekatan dalam menggerakkan masyarakat (Yunilisiah 1996; Winarno 2003; Jamal 2008b).

Pembangunan pedesaan di Indonesia sejak Orde Baru lebih didominasi pendekatan intervensi rendah atau model produktivitas. Upaya pemerintah terfokus pada peningkatan produktivitas pertanian dengan mengabaikan perbaikan struktur sosial dan kepemilikan lahan oleh masyarakat (Winarno 2003). Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah keterbelakangan desa lebih disebabkan oleh keterbatasan kemampuan masyarakat dan rendahnya akses terhadap teknologi. Pembangunan desa terutama bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap *input* usaha tani dan keterampilan dalam berusaha tani.

Pembangunan Pedesaan dan Pertanian

Berdasarkan pendekatan tersebut, penguasaan lahan yang luas menjadi faktor penentu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Penguasaan lahan juga menentukan bentuk keterlibatan masyarakat pada usaha yang tidak berbasis lahan dan usaha nonpertanian.

Petani yang menguasai lahan luas dapat memanfaatkan surplus dari kegiatan pertanian. Usaha yang tidak berbasis lahan dan nonpertanian bersifat padat modal. Sementara petani berlahan sempit terpaksa bekerja pada kegiatan yang tidak berbasis lahan dan nonpertanian yang bersifat padat karya karena penghasilan dari lahan yang dimiliki tidak memadai (Sajogyo 2002).

Belajar dari pengalaman beberapa negara di Asia, terutama Korea, China, dan Taiwan, keberhasilan pembangunan pedesaan ditopang oleh pengembangan pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Petani menguasai pasar *input* dan *output* dan merangsang usaha tani intensif pada lahan yang terbatas dan membuka kesempatan bagi petani untuk

masuk ke sektor industri dan perkotaan. Upaya ini dilandasi oleh peningkatan produktivitas dan ragam usaha baru di pedesaan melalui surplus produk pertanian (Jamal 2008b, 2009a). Situasi ini mendukung upaya transformasi tenaga kerja di sektor pertanian dan mengurangi jumlah orang yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian (Rosegrant dan Hazell 2000; Pakpahan *et al.* 2005; Sudaryanto dan Jamal 2006).

Di Indonesia, pembangunan pertanian seakan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, dengan dukungan yang terbatas dari sektor lainnya. Petani umumnya bergelut pada kegiatan budi daya, sementara pasar *input* dan *output* dikuasai oleh pihak lain. Usaha di luar budi daya masih terpusat pada perdagangan dan industri pengolahan. Namun, kegiatan ini umumnya dalam skala mikro, tenaga kerja dari keluarga, modal dan manajemen lemah, dan 40% lokasi usaha tidak permanen (Suhariyanto 2007; Nurmanaf dan Irawan 2009). Lemahnya dukungan sektor lainnya dalam pembangunan pertanian mempersulit pengembangan usaha yang lebih beragam (Jamal 1992, 1994; Jamal dan Hutabarat 1995). Pembangunan pertanian masih terjebak pada persoalan akses masyarakat terhadap sumber daya pembangunan, terutama lahan, teknologi, permodalan, dan informasi (Sudaryanto *et al.* 2000; Jamal 2008a; van de Fliert *et al.* 2010).

Keterkaitan Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan

Hal lain yang memengaruhi dinamika pembangunan pedesaan terkait dengan keberadaan perkotaan. Berdasarkan data tahun 2009, sekitar 57% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Dari jumlah tersebut, 70% di antaranya menggantungkan hidupnya pada pertanian. Menurut hasil Sensus Pertanian 2003, jumlah rumah tangga pertanian mencapai 25,6 juta atau 48,7% dari total rumah tangga.

Perencanaan pembangunan pedesaan dan perkotaan di Indonesia telah dicoba dalam berbagai konsep, terakhir melalui pendekatan agropolitan. Pendekatan agropolitan menekankan pada pembangunan pedesaan yang mengait dengan pembangunan perkotaan pada tingkat lokal (Friedma dan Douglass 1975). Dalam implementasi konsep ini, keterkaitan lebih dilihat sebagai aliran produk pertanian sebagai bahan baku untuk mendukung pengembangan industri di perkotaan dan transfer surplus tenaga kerja dari pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (Daryanto 2003; Rusastra *et al.*

2004; Suhariyanto 2007; Agusta 2008). Selain itu, *multiplier effect* dan difusi belum sepenuhnya terjadi, karena konsep ini mensyaratkan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat relatif rendah, dan masyarakat memiliki akses yang seimbang terhadap sumber daya produktif (Agusta 2008). Akibatnya, agropolitan belum mampu menumbuhkan usaha baru dan memperbaiki distribusi sumber daya di pedesaan (Suhariyanto 2007; Agusta 2008; Nurmanaf dan Irawan 2009).

KETIMPANGAN PENGUASAAN DAN SISTEM ALOKASI LAHAN

Alokasi lahan dan pelapisan di masyarakat merupakan warisan dari berbagai kebijakan sejak zaman penjajahan. Pada awalnya tidak dikenal lahan milik pribadi, karena semua lahan adalah milik raja atau kelompok masyarakat secara komunal, seperti yang banyak ditemui saat ini di Sumatera Barat dan Papua (Jamal *et al.* 2001, 2002). Masuknya konsep kepemilikan individu dan hak pengusahaan dalam bentuk hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa mendorong makin timpangnya penguasaan lahan di masyarakat.

Dalam periode 1983-2003, jumlah petani dengan luas garapan kurang dari 0,5 ha meningkat dari 44,5% menjadi 56,4%, sementara total luas lahan yang dikuasai berkurang dari 10,5% menjadi 4,95%. Di sisi lain, jumlah petani yang menguasai lahan lebih dari 2 ha berkurang dari 13,5% menjadi 11,3% dengan luas lahan yang dikuasai relatif tetap yaitu di atas 45%. (Lokollo *et al.* 2007; Tjondronegoro dan Wiradi 2008). Terakhir Kepala Badan Pertanahan Nasional mengungkapkan, 56% aset yang ada di Indonesia, baik berupa properti, tanah, maupun perkebunan hanya dikuasai oleh 0,2% penduduk Indonesia (Yusuf 2010).

Kebijakan Distribusi Lahan

Sejak awal kemerdekaan, para pemimpin negara telah menyadari ketimpangan penguasaan lahan, sehingga penyusunan aturan tentang distribusi lahan mendapat prioritas utama, sampai akhirnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mengamatkan pelaksanaan reforma agraria. Reforma agraria dimaknai sebagai penataan atas penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) atau

sumber-sumber agraria menuju struktur P4T yang berkeadilan dengan langsung mengatasi pokok persoalannya (Badan Pertanahan Nasional 2007; Winoto 2007).

Reforma agraria tidak sama maknanya dengan program pendistribusian atau pembagian tanah semata (*land reform*). Justru esensinya yang perlu terus dijaga adalah bagaimana masyarakat penerima manfaat dapat mengoptimalkan pengelolaan lahannya secara berkesinambungan guna meningkatkan kualitas hidup dan penghidupannya (*access reform*) (Badan Pertanahan Nasional 2007; Winoto 2007).

Upaya Perbaikan Distribusi Lahan

Kurang berkembangnya ragam usaha di pedesaan dan tingginya ketergantungan pada usaha berbasis lahan telah mendorong berbagai gerakan di masyarakat untuk memperbaiki akses terhadap lahan. Pemikiran yang dominan melihat bahwa pembangunan pedesaan membutuhkan perbaikan penguasaan lahan. Karena itu, pelaksanaan perbaikan penguasaan lahan, yang lebih diartikan secara sempit sebagai *land reform*, menjadi prasyarat pelaksanaan pembangunan pedesaan (Wiradi 2000b; Tjondronegoro dan Wiradi 2008; Soetarto 2010).

Penyelenggaraan reforma agraria dalam arti sempit membutuhkan lahan pertanian yang sangat luas, mengingat 14 juta rumah tangga petani saat ini adalah petani berlahan sempit dan tuna kisma. Bila diasumsikan setiap petani memerlukan tambahan lahan 1,0 ha, karena basis usaha petani masih pada kegiatan budi daya, maka minimal dibutuhkan tambahan lahan 14 juta ha (Jamal 2000a, 2000b; Jamal *et al.* 2002; Winarno 2003; Sumaryanto 2010).

Penyediaan lahan seluas ini dan proses distribusinya menjadi persoalan tersendiri (Jamal 2000a, 2000b; Badan Pertanahan Nasional 2007; Winoto 2007; Jamal 2009a). Selain itu, perbaikan distribusi lahan tidak dengan sendirinya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Bila lahan yang diterima petani tidak dapat dikelola dengan baik dan ketergantungan pada usaha berbasis lahan masih dominan, maka dalam satu generasi lahan ini akan kembali menyempit karena proses pewarisan dan jual beli (Yunilisiah 1996; Kasryno *et al.* 2000; Wiradi 2000a; Jamal *et al.* 2001; Hartini 2005).

Land Reform dan Access Reform

Pada awal tahun 1960-an, Indonesia berusaha melaksanakan *land reform*. Namun, upaya ini gagal ber-

samaan dengan berakhirnya kekuasaan Orde Lama (Moniaga 1993). Pelaksanaan *land reform* yang dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan dan penguasaan lahan, ternyata tidak cukup memadai meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan aset secara berkesinambungan guna meningkatkan kualitas hidup dan penghidupannya (Jamal 2000a, 2000b; Wiradi 2000b; Jamal *et al.* 2002).

Perbaikan akses terhadap lahan perlu disertai dengan akses terhadap hal lain yang menunjang upaya peningkatan kapasitas petani dalam pemanfaatan lahan, terutama akses terhadap informasi, teknologi, dan permodalan (*access reform*) (Badan Pertanahan Nasional 2007; Winoto 2007). Pelaksanaan *land reform* yang tidak disertai perbaikan akses terhadap beberapa hal tersebut menyebabkan beberapa petani penerima objek *land reform* tidak siap mengelola lahan yang diterima, sehingga dalam waktu yang tidak lama lahan tersebut terakumulasi lagi pada beberapa petani kaya (Yunilisiah 1996; Wiradi 2000a; Hartini 2005).

Perbaikan Penguasaan Lahan melalui Program Transmigrasi

Program transmigrasi merupakan salah satu upaya perbaikan penguasaan lahan yang berhasil dilakukan Indonesia, dengan memindahkan penduduk dari wilayah padat ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Namun, banyak kasus mengungkapkan lahan yang awalnya dibagi merata, setelah beberapa tahun kembali terjadi ketimpangan. Pelaksanaan transmigrasi di salah satu lokasi di Bengkulu Utara pada tahun 1977, dengan penguasaan lahan yang awalnya merata satu hektare, setelah 18 tahun kemudian gini rasionya menjadi 0,54 dengan kategori ketimpangan berat (Yunilisiah 1996).

Kondisi tersebut disebabkan petani masih mengandalkan kegiatan budi daya, kurang berkembangnya ragam usaha, dan tingginya ketergantungan pada lahan. Keadaan ini membawa petani dalam kondisi sulit, dan dalam jangka 5-10 tahun, beberapa petani terpaksa menjual lahannya. Hal lain yang mendorong keadaan ini adalah pola pewarisan yang menyebabkan lahan terfragmentasi pada luasan yang sempit (Yunilisiah 1996; Jamal *et al.* 2001, 2002).

Penataan Pengusahaan Lahan

Pengalaman pelaksanaan penataan pengusahaan lahan di pedesaan melalui pendekatan *corporate*

farming, *consolidated farming*, dan *cooperative farming* dapat dijadikan pembelajaran (Rusastra *et al.* 2001; Dinas Pertanian Jawa Timur 2004; Blyth *et al.* 2007; Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air 2009). Ketiga pendekatan tersebut pada prinsipnya merupakan konsolidasi pengusahaan lahan untuk meningkatkan luas lahan yang digarap, mencegah fragmentasi pemilikan dan fisik hamparan lahan, serta memfasilitasi tumbuhnya usaha yang beragam di pedesaan (Rusastra *et al.* 2001; Dinas Pertanian Jawa Timur 2004; Blyth *et al.* 2007; Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air 2009). Namun, upaya ini belum sepenuhnya mampu mengembangkan diversifikasi usaha dan usaha yang tidak berbasis lahan. Petani yang tersingkir dari upaya penataan pengusahaan lahan masih sangat bergantung pada lahan yang ada.

Penataan pengusahaan lahan belum sepenuhnya mampu menciptakan peluang usaha baru di pedesaan dan membekali petani untuk mengembangkan usaha baru sesuai potensi yang ada (Badan Litbang Pertanian 2000; Sudaryanto dan Jamal 2002; Jamal dan Mardiharini 2009). Kecenderungan yang berkembang di masyarakat justru makin terdistribusinya lahan garapan dalam bentuk saku, sewa, dan gadai. Hal ini karena basis utama kegiatan pertanian di pedesaan masih pada usaha budi daya (Jamal 2001, 2006; Jamal *et al.* 2007a; Jamal dan Mardiharini 2009; Jamal dan Dewi 2010).

MENELISIK PENYEBAB KETIMPANGAN PENGUASAAN LAHAN

Minimal terdapat lima penyebab ketimpangan penguasaan lahan di masyarakat, yakni kebijakan yang tidak konsisten, kurangnya keberpihakan pada petani kecil, pembangunan pedesaan hanya menguntungkan petani berlahan luas, teknologi bias kepada petani berlahan luas, dan pendekatan diseminasi yang belum tepat.

Kebijakan yang Tidak Konsisten

Dari sisi kebijakan distribusi lahan, upaya perbaikan struktur penguasaan lahan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria terbentur pada kebijakan pemerintah yang tidak konsisten sejak era Orde Baru (Moniaga 1993; Jamal 2000a; Blyth *et al.* 2007; Jamal dan Dewi 2010). Diawali dengan semangat untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 1 tahun 1967 yang disempurnakan menjadi UU No. 11

tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing. Selain itu juga disusun UU No 8 Tahun 1968 yang disempurnakan menjadi UU No 12 Tahun 1971 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Moniaga 1993; Jamal 2000a, 2000b; Badan Pertanahan Nasional 2007; Jamal 2008b). Kedua undang-undang ini mendorong berkembangnya nilai tanah dari segi ekonomi semata, sebagai sarana investasi dan spekulasi, bukan lagi faktor produksi (Jamal 2000b).

Dalam perkembangan selanjutnya, berbagai kontradiksi tentang pengaturan distribusi lahan terus berkembang. Berdasarkan studi yang dilaksanakan BPN terhadap berbagai peraturan tentang pemanfaatan lahan, ditemukan 582 dokumen hukum, yang terdiri atas 12 undang-undang, 48 peraturan pemerintah, 22 keputusan presiden, 4 instruksi presiden, 243 peraturan menteri/Kepala BPN, 209 surat edaran menteri/Kepala BPN, dan 44 petunjuk menteri/Kepala BPN (Winoto 2009). Di antara peraturan ini terdapat peraturan yang tumpang-tindih atau bertentangan satu sama lainnya, dan beberapa di antaranya tidak bisa diterapkan (Winoto 2009).

Kurangnya Keberpihakan kepada Petani Kecil

Sejalan dengan berbagai kemudahan dalam penguasaan dan pengusahaan lahan dalam skala luas oleh swasta besar, termasuk pihak asing, upaya perbaikan penguasaan lahan bagi petani kecil terabaikan. Distribusi lahan cenderung diserahkan kepada mekanisme pasar. Kondisi ini berdampak pada distribusi lahan kepada individu dan sektoral. Bagi individu petani, kondisi ini akan semakin mendorong terjadinya ketimpangan penguasaan lahan di masyarakat, karena petani kaya mengakumulasi lahan melalui berbagai cara dari petani berlahan sempit yang tinggal di sekitarnya (Sumardjono 2001; Sumaryanto *et al.* 2002; Syahyuti dan Jamal 2006).

Untuk alokasi lahan antarsektor, hasil analisis ekonomi sewa lahan (*land rent economics*) menunjukkan bahwa rasio sewa lahan perumahan dan industri jauh lebih baik daripada lahan usaha tani (Jamal 2006). Tanpa upaya yang sistematis untuk meningkatkan produktivitas lahan melalui diversifikasi usaha, alokasi lahan untuk kegiatan pertanian akan semakin berkurang akibat alih fungsi lahan ke penggunaan yang memiliki nilai ekonomi sewa lahan yang lebih tinggi.

Kurangnya keberpihakan pada upaya perbaikan penguasaan lahan oleh petani kecil dapat dilihat dari alotnya pembahasan berbagai peraturan perundangan

yang mendukung upaya perbaikan distribusi lahan di tingkat petani. Di sisi lain, berbagai peraturan yang mendukung alokasi lahan untuk usaha skala besar, seperti *food estate*, begitu mudah dan cepat prosesnya (Kasryno *et al.* 2011).

Pembangunan Pedesaan Menguntungkan Petani Berlahan Luas

Upaya pemerintah yang terfokus pada peningkatan produktivitas pertanian melalui perbaikan akses masyarakat terhadap *input* usaha tani dan keterampilan dalam berusaha tani, lebih banyak menguntungkan petani yang memiliki lahan luas (Rosegrant dan Hazell 2000; Jamal 2008b; Jamal dan Dewi 2010). Mereka dapat memacu peningkatan produksi melalui penggunaan teknologi dan mengakumulasi modal untuk pengembangan usaha.

Sementara itu, petani berlahan sempit, karena kurangnya akses terhadap berbagai kesempatan yang disediakan pemerintah, sulit mengembangkan usahanya dan terpaksa bertahan dengan keterbatasannya. Dalam beberapa kasus, mereka terpaksa melepaskan lahannya kepada petani berlahan luas (Blyth *et al.* 2007; Jamal dan Dewi 2010).

Data PATANAS tahun 1995 dan 2007 menunjukkan bahwa penguasaan lahan usaha tani sawah di Jawa menurun dari rata-rata 0,49 ha menjadi 0,36 ha (Jamal 2005; Nurmanaf dan Irawan 2009; Sumaryanto dan Sudaryanto 2009; Sumaryanto 2010). Kasus di tiga desa di Jawa menunjukkan 64-76% petani tidak memiliki lahan, sementara 1-3% rumah tangga menguasai 36-54% lahan (Tjondronegoro dan Wiradi 2008).

Teknologi Bias kepada Petani Berlahan Luas

Dominannya teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi dalam kegiatan budi daya dan terbatasnya inovasi untuk memacu nilai tambah, secara tidak langsung makin mendorong ketimpangan penguasaan lahan di pedesaan (Blyth *et al.* 2007; Jamal 2008b; van de Fliert *et al.* 2010). Dengan rata-rata penguasaan lahan di bawah 0,5 ha, upaya peningkatan produksi belum banyak berpengaruh terhadap penghasilan dan kesejahteraan petani. Kondisi ini mendorong terjadinya akumulasi lahan oleh petani berlahan luas, sebagaimana data sebelumnya (Jamal 2007; Jamal *et al.* 2007b, 2008; Jamal 2009b).

Teknologi yang mendukung pengembangan nilai tambah atau usaha terpadu di pedesaan dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, termasuk petani berlahan sempit (Jamal 2007; Jamal *et al.* 2007b). Selain itu, beberapa teknologi yang dihasilkan tidak bersifat netral terhadap skala usaha, karena teknologi hanya menguntungkan bila diterapkan dalam skala luas (Jamal 2007; Jamal *et al.* 2007b; Sarwani *et al.* 2010; Sarwono *et al.* 2011).

Pendekatan Diseminasi Belum Tepat

Upaya diseminasi teknologi dalam banyak kasus juga makin mendorong ketimpangan penguasaan lahan di pedesaan. Petani kooperator atau kelompok tani binaan biasanya dipilih dari tokoh petani dan umumnya petani kaya dengan penguasaan lahan yang luas (Blyth *et al.* 2007; Jamal 2008a; Jamal dan Dewi 2010; van de Fliert *et al.* 2010).

Harapan agar petani kooperator atau ketua kelompok tani dapat menularkan pemahamannya tentang teknologi yang diintroduksi kepada petani lain belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan (Jamal 2007; Jamal *et al.* 2007b, 2008; Jamal 2009b). Beberapa hasil penelitian mengungkapkan petani kooperator lebih banyak menarik manfaat dari teknologi yang diintroduksi dan memperkuat posisi mereka dalam berhadapan dengan petani lain yang ada di sekitarnya (Jamal *et al.* 2008; Jamal 2009b; Sarwani *et al.* 2010; 2011).

ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEDESAAN

Arah Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan yang bersifat netral terhadap ketimpangan penguasaan sumber daya dan beragamnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang usaha yang berkembang di sekitarnya, merupakan patokan utama dalam memilih pendekatan pembangunan pedesaan ke depan. Pembangunan pedesaan yang membuka peluang bagi setiap individu untuk mengembangkan kapasitasnya merupakan pendekatan yang netral terhadap berbagai ketimpangan yang ada di masyarakat. Peningkatan kapasitas ini akan memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha yang beragam dan mengurangi ketergantungan pada usaha berbasis lahan yang luas.

Strategi Pembangunan

Diperlukan perubahan strategi pembangunan desa. Hal yang utama adalah mengubah pendekatan yang bersifat sektoral menjadi pendekatan pembangunan wilayah. Untuk itu diperlukan perubahan pada semua tingkatan, dimulai dari tingkat pusat hingga desa (Jamal 2008a, 2009a; Rusastra 2010).

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) yang direncanakan pemerintah pada enam koridor ekonomi (KE), yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Kepulauan Maluku, dapat menjadi dasar terlaksananya koordinasi dalam pendekatan pembangunan desa ke depan.

Secara lebih detail, strategi yang perlu dilakukan meliputi:

1. Tolak ukur keberhasilan pembangunan lebih dilihat dalam pengembangan wilayah, dan desa sebagai satuan wilayah terkecil.
2. Pembangunan pedesaan harus dapat membuka peluang usaha yang beragam, dengan fokus peningkatan nilai tambah, melalui perbaikan kemampuan petani, terutama petani berlahan sempit, dalam mengakses informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya.
3. Pemanfaatan sumber daya secara maksimal, yang didukung oleh upaya peningkatan nilai tambah dan usaha yang tidak berbasis lahan yang luas, untuk mengurangi tekanan terhadap lahan dan menjadi basis bagi upaya perbaikan penguasaan lahan ke depan (Jamal dan Mardiharini 1999).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Pelaksanaan pembangunan pedesaan didominasi oleh pendekatan intervensi rendah atau model produktivitas, sehingga upaya pemerintah terfokus pada peningkatan produktivitas pertanian dan mengabaikan perbaikan struktur sosial dan kepemilikan lahan di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan makin timpangnya penguasaan dan pengusahaan lahan di pedesaan. Lapisan atas komunitas desa dan petani berlahan luas merupakan pihak yang paling banyak diuntungkan pendekatan ini.

Upaya pengembangan kegiatan berbasis peningkatan nilai tambah tidak banyak berkembang, dan ragam usaha juga tidak banyak berubah, sehingga tekanan terhadap lahan semakin meningkat. Perluasan

lahan untuk usaha pertanian sangat lambat, sementara alih fungsi lahan ke penggunaan nonpertanian terus meningkat. Tanpa dukungan sistem perencanaan yang sistematis yang memungkinkan perbaikan akses bagi petani, terutama petani berlahan sempit, dalam hal teknologi, informasi, modal, dan pasar, maka perbaikan penguasaan lahan tidak mendukung upaya perbaikan kesejahteraan petani.

Implikasi Kebijakan

Reorientasi pembangunan pedesaan ke depan diawali perubahan pendekatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan penekanan pada upaya pengembangan jenis usaha yang beragam, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang berkembang di sekitarnya. Upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang meliputi:

1. Pembangunan pedesaan dilaksanakan melalui pendekatan wilayah secara terpadu, melalui kerja sama yang kuat di tingkat kecamatan di bawah koordinasi Bappeda kabupaten. Pembangunan ditekankan pada penyiapan sumber daya manusia agar mereka dapat memanfaatkan peluang usaha yang tidak berbasis lahan yang luas.
2. Fungsi koordinasi perencanaan di tingkat pusat melalui Bappenas diperkuat, yang diikuti dengan alokasi anggaran pendukungnya. Uji coba secara sistematis dapat dilakukan melalui program MP3EI.
3. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pedesaan perlu diarahkan pada dua hal pokok, yakni membuka peluang usaha baru, terutama yang tidak berbasis lahan luas, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menangkap peluang usaha yang ada.
4. Teknologi yang dikembangkan bersifat netral terhadap skala usaha, dengan penekanan pada upaya peningkatan nilai tambah dan pengembangan ragam usaha. Diseminasi teknologi diupayakan proporsional agar dapat menjangkau semua lapisan petani.
5. Reorientasi pembangunan pedesaan diawali dengan pengembangan desa model di setiap kabupaten, yang memperlihatkan penumbuhan ragam usaha melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, dan keterkaitan yang saling mendukung dengan wilayah perkotaan. Desa model akan membuka peluang usaha yang beragam bagi petani kecil dan tuna kisma, serta memperbaiki penguasaan lahan di tingkat petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. 2008. Lompatan paradigmatik program agropolitan di Indonesia: Dari paradigma pembangunan berbasis manusia menuju paradigma modernisasi. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Riset dan Kebijakan Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, 20-21 Agustus 2008.
- Badan Litbang Pertanian. 2000. Studi Diagnostik untuk Pelaksanaan *Corporate Farming* di Jawa Tengah. Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional. 2007. Reforma Agraria Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat. BPN, Jakarta.
- Blyth, M., S. Djoeroemana, J.R. Smith, and B. Myers. 2007. Integrated rural development in East Nusa Tenggara, Indonesia. Overview of opportunity, constraint and option for improving livelihoods. In Djoeroemana, B. Myers, J.R. Smith, M. Blyth, I.E.T. Salean (Eds). *Proceedings of a Workshop to Identify Sustainable Rural Livelihoods held in Kupang, Indonesia*, 5-7 April 2006. ACIAR. Canberra.
- Daryanto, A. 2003. Disparitas pembangunan perkotaan dan pedesaan di Indonesia. *Agrimedia* 8(2): 30-39.
- Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. 2004. Model *Cooperative Farming* Berbasis Padi dan Palawija. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air. 2009. Pedoman Teknis Konsolidasi Pengelolaan Lahan Usahatani (*Consolidated Farming*). http://pla.deptan.go.id/pdf/06_PEDOMAN_TEKNIS_CONS_FARMING_2009.pdf.
- Friedma, J. and M. Douglass. 1975. Agropolitan Development: Toward New Strategy for Regional Planning in Asia. UNCRD, Nagoya, Japan.
- Hartini, W. 2005. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Kabupaten Brebes. Universitas Negeri Semarang. <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/import/1191>. pdf.
- Jamal, E. 1992. Aspek ekonomi pengembangan usaha budidaya rumput laut di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 9(2) dan 10(1): 11-20.
- Jamal, E. 1994. Usaha di luar kegiatan penangkapan ikan di desa pantai: Peluang dan tantangan pengembangannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 12(2): 1-10.
- Jamal, E. dan B. Hutabarat. 1995. Identifikasi wilayah miskin di Provinsi Timor Timur: Kabupaten Aileu dan Ambeno. Dalam Hermanto *et al.* (Ed.). *Prosiding Pengembangan Hasil Penelitian Kemiskinan di Pedesaan: Masalah dan Alternatif Penanggulangannya*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Jamal, E. dan M. Mardiharini 1999. Pentingnya reformasi agraria untuk menjamin pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Makalah disampaikan pada Simposium Internasional PERHIMPI, Bogor, 18-20 Oktober 1999.
- Jamal, E. 2000a. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 18(1-2): 16-24.
- Jamal, E. 2000b. Pembaruan agraria dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dalam I W. Rusastra *et. al.* (Ed.). *Prosiding Perspektif Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dalam Era Otonomi Daerah*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Jamal, E. 2001. Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan harga lahan sawah pada proses alih fungsi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian: Studi kasus di beberapa desa Kabupaten Karawang, Jawa Barat. *Jurnal Agro Ekonomi* 19(1): 45-63.
- Jamal, E., T. Pranadji, A.M. Hurun, A. Setyanto, R.E. Manurung, dan M.Y. Napiri. 2001. Struktur dan Dinamika Penguasaan Lahan pada Komunitas Lokal. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Jamal, E., Syahyuti, dan A.M. Hurun. 2002. Reforma agraria dan masa depan pertanian. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 21(4): 133-139.
- Jamal, E. 2005. Efficiency of Land Tenure Contracts in West Java, Indonesia. University of the Phillipines, Los Banos.
- Jamal, E. 2006. Revitalisasi pertanian dan upaya perbaikan penguasaan lahan di tingkat petani. *Jurnal Analisis Sosial* 11(1).
- Jamal, E. 2007. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) ujung tombak diseminasi teknologi pertanian berkelanjutan. Dalam F. Kasryno *et al.* (Ed.). *Membangun Kemampuan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Jamal, E., E. Ariningsih, Hendiarto, K.M. Noekman, dan A. Asikin. 2007a. Beras dan jebakan kepentingan jangka pendek. *Analisis Kebijakan Pertanian* 5(3): 224-238.
- Jamal, E., F. Kasryno, dan K. Kariyasa. 2007b. Prima Tani dan upaya revitalisasi diseminasi teknologi pertanian. Dalam F. Kasryno *et al.* (Ed.). *Membangun Kemampuan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Jamal, E. 2008a. Dissemination of site-specific rice fertilization technology in Indonesia. Paper presented at Workshop on Rice Technology Transfer System in Asia. ITCC, RDA, Suwon, South Korea, 29 September 2008.
- Jamal, E. 2008b. Kajian kritis terhadap pelaksanaan pembangunan pedesaan di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 26(2): 92-102.
- Jamal, E., M. Mardiharini, dan M. Sarwani. 2008. Proses diseminasi pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (PTT) padi: Suatu pembelajaran dan perspektif ke depan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 6(3): 272-285.
- Jamal, E. 2009a. Membangun momentum baru pembangunan pedesaan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 28(1): 7-14.
- Jamal, E. 2009b. Telaahan penggunaan pendekatan sekolah lapang dalam pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi: Kasus di Kabupaten Blitar dan Kediri, Jawa Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 7(4): 337-349.
- Jamal, E. and M. Mardiharini. 2009. The choice of land tenure contracts in the presence of transaction costs in rice farming in West Java, Indonesia. Contributed paper at the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China, 16-22 August 2009. <http://ageconsearch.umn.edu/handle/51204>.
- Jamal, E. and Y.A. Dewi. 2010. Technical efficiency of land tenure contracts in West Java Province, Indonesia. *Asian J. Agric. Dev.* 6(2): 21-34.
- Jayadinata, J.T. dan I.G.P. Paramandika. 2006. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Penerbit Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Kasryno, F., E. Jamal, dan I. Las. 2000. Reorientasi pembangunan pertanian Sumatera Barat: Suatu kilas balik dan perspektif ke depan. Makalah disampaikan pada *Round Table Discussion* Pembangunan Pertanian Sumatera Barat, Bogor, 6 Mei 2000.
- Kasryno, F., M. Badrun, dan E. Pasandaran. 2011. *Land Grabbing* Perampasan Hak Konstitusional Masyarakat. Yayasan Pertanian Mandiri.

- Lokollo, E.M., I.W. Rusastra, H.P. Saliem, Supriyati, S. Friyatno, dan G.S. Budhi. 2007. Dinamika sosial ekonomi pedesaan: Analisis perbandingan antarsensus pertanian. Seminar Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/ind/SHP_EML_2007.pdf.
- Moniaga, S. 1993. Toward community-based forestry and recognition of *adat* property rights in the outer islands of Indonesia. pp. 131-150. In J. Fox (Ed.). *Legal Frameworks for Forest Management in Asia: Case studies of community/state relations*. East West Center Program on Environment, Honolulu.
- Nurmanaf, A.R. and B. Irawan. 2009. Land and household economy: Analysis of National Panel Survey. pp. 83-97. In I W. Rusastra, S.M. Pasaribu and Y. Yusdja (Ed.). *Proceedings of National Seminar on Land and Household Economy 1970-2005: Changing road for Poverty reduction*. Indonesian Center for Agriculture Socio-Economic and Policy Studies and United Nations ESCAP, Bogor.
- Pakpahan, A., H. Kartodihardjo, R. Wibowo, H. Nataatmadja, S. Sadjad, E. Haris, dan H. Wijaya. 2005. *Membangun Pertanian Indonesia: Bekerja, bermartabat dan sejahtera*. Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor. Cetakan II. 207 hlm.
- Rosegrant, M.W. and P.B. Hazell. 2000. *Transforming the Rural Asian Economy: The Unfinished Revolution*. Asian Development Bank, Oxford University Press. www.ifpri.org/2020/briefs/brief69.pdf.
- Rusastra, I W., S.K. Darmoredjo, Wahida, dan A. Setiyanto. 2001. Konsolidasi lahan untuk mendukung pengembangan agribisnis. Dalam I W. Rusastra, S.K. Darmoredjo, Wahida, A. Setiyanto (Ed.). *Prosiding Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001 ke Depan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Rusastra, I W., Hendiarto, K.M. Noekman, A. Supriatna, W.K. Sejati, dan D. Hidayat. 2004. Kinerja dan perspektif pengembangan model agropolitan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah berbasis agribisnis. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Rusastra, I W. 2010. Reorientasi Paradigma dan Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian, Bogor, 30 Desember 2010. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Sajogyo. 2002. Pertanian dan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Rakyat* Nomor 1 Tahun 1, Maret 2002. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_5.htm.
- Sarwani, M., E. Jamal, V. Hanifah, and J.A. Dewi. 2010. The research-extension linkage in the dissemination of integrated crop management for rice in Indonesia. pp. 55-66. In F.G. Palis, G.R. Singleton, M.C. Casimero, and B. Hardy (Eds.). *Research to Impact: Case studies for natural resources management for irrigated rice in Asia*. IRRI, Los Banos.
- Sarwani, M., E. Jamal, K. Subagyo, E. Sirnawati, dan V.W. Hanifah. 2011. Diseminasi di BPTP: Pemikiran inovatif transfer teknologi spesifik lokasi. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 9(1): 73-89.
- Soetarto, E. 2010. *Reforma Agraria: Jalan perubahan menuju Indonesia sejahtera, adil dan demokratis*. Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Pertanian Bogor, 2 Oktober 2010. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sudaryanto, T., I W. Rusastra, dan E. Jamal. 2000. Kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan dalam mendukung otonomi daerah. Dalam I W. Rusastra *et al.* (Ed.). *Prosiding Perspektif Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dalam Era Otonomi Daerah*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Sudaryanto, T. dan E. Jamal. 2002. Pengembangan agribisnis peternakan melalui pendekatan *corporate farming* untuk mendukung ketahanan pangan nasional. hlm. 35-47. Dalam Sudaryanto *et al.* (Ed.). *Pendekatan Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agribisnis*. Monograph Series No. 22. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Sudaryanto, T. and E. Jamal. 2006. Developing agricultural and rural development indicators in Indonesia. Workshop at Australian National University, 21 August 2006. ACIAR, Canberra.
- Suharyanto, K. 2007. Kinerja dan perspektif kegiatan non-pertanian dalam ekonomi pedesaan. hlm. 1-11. Dalam K. Suradisastra, Y. Tisdja, B. Hutabarat (Ed.). *Prosiding Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Mencari Alternatif Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Sumardjono, M.S.W. 2001. *Kebijakan Pertanian, Antara Regulasi dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sumaryanto dan T. Sudaryanto. 2009. Perubahan pendapatan rumah tangga pedesaan: Analisis data Patanas tahun 1995 dan 2007. hlm. 1-18. Dalam K. Suradisastra, Y. Yusdja, dan A.R. Nurmanaf (Ed.). *Prosiding Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Sumaryanto, E. Jamal, Syahyuti, dan I. Setiadji. 2002. *Kajian Pembaruan Agraria dan Implikasinya terhadap Usaha Pertanian*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Sumaryanto. 2010. Eksistensi pertanian skala kecil dalam era persaingan pasar global. hlm. 36-59. Dalam I W. Rusastra K. Suradisastra, P. Simatupang, dan B. Hutabarat (Ed.). *Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Syahyuti dan E. Jamal. 2006. *Perumusan Konsep dan Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengimplementasikan Revitalisasi Pertanian*. Membalik Arus Menuai Kemandirian Petani. Yayasan Padi Indonesia.
- Tjondronegoro, S.M.P. dan G. Wiradi. 2008. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Edisi revisi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Van de Fliert, E., E. Jamal, and B. Christiana. 2010. The Do It Yourself Formula - Internalising participatory communication principles to support rural development in Eastern Indonesia. p. 585-593. In I. Darnhofer and M. Grötzer (Eds.). *Proceedings of the 9th European IFSA Symposium held in Vienna, Austria*. The Universität für Bodenkultur, Vienna.
- Winarno, B. 2003. *Komparasi organisasi pedesaan dalam pembangunan, Indonesia vis a vis Taiwan, Thailand, dan Filipina*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Winoto, J. 2007. *Reforma agraria dan keadilan sosial*. Orasi Dies Natalis ke-44 Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Winoto, J. 2009. Taking land policy and administration in Indonesia to the next stage and national land agency's strategic plan. Workshop in International Federation of Surveyors' Forum, Washington DC, March 2009.

- Wiradi, G. 2000a. Perkebunan dalam wacana semangat pembaruan (sebuah catatan ringkas). *Dalam* Sutarto *et al.* (Ed.). Prosiding Lokakarya Pola Penguasaan Lahan dan Pola Usaha serta Pemberdayaan BPN dan Pemda dalam rangka Partisipasi Rakyat di Sektor Perkebunan. Pusat Kajian Agraria, LP-IPB, Bogor.
- Wiradi, G. 2000b. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. N. Fauzi (Ed.). Insist Press, Yogyakarta.
- Yunilisiah. 1996. Pola penguasaan tanah dan kualitas hidup rumah tangga petani di desa transmigrasi (studi kasus di Desa Transmigrasi Margasakti, Bengkulu Utara, Bengkulu). Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor. http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/22188/1996yun_abstract.pdf?sequence=2.
- Yusuf, T. 2010. Tangisan SBY versus UUPA. Kompas edisi 27 Oktober 2010. <http://oase.kompas.com/read/2010/10/27/04124257/Tangisan.SBY.Versus.UU.PA>.